

## **Kontribusi Muslim Minoritas dalam Menggulingkan Rezim Apartheid Di Afrika Selatan (1948-1994)**

**Afik Fathur Rohman**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Jl. A. Yani 40-A (+62 281) 635624 Purwokerto 53126  
Email: [afikfathur98@gmail.com](mailto:afikfathur98@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Sejarah munculnya politik apartheid di Afrika Selatan, dan (2) Kontribusi umat Muslim dalam menentang rezim apartheid di Afrika Selatan dengan kurun waktu 1948-1994. Jenis penelitian ini memusatkan pada *library reseach* (studi pustaka). Adapaun langkah yang digunakan dalam meneliti objek kajian ini adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau yang sering disebut dengan istilah metodologi penelitian sejarah. Hasil-hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Politik Apartheid secara resmi berlangsung selama empat puluh dua tahun (1948-1990). Hal tersebut dilatar belakangi adanya kelompok kulit putih yang merasa dirinya lebih unggul daripada kelompok kulit hitam yang dipandang sebagai budak, pelayan. Apartheid yang memiliki arti pemisahan, dibentuk dengan tujuan menjaga kemurnian rasnya, sehingga untuk merealisasikannya Malan yang memenangkan pemilu tahun 1948 membuat semacam strategi kebijakan politik yang kemudian berkembang menjadi diskriminasi terhadap kulit hitam. *Kedua*, Kebijakan pelaksanaan politik apartheid yang banyak menindas kulit hitam, termasuk umat Muslim memicu adanya penolakan dan perlawanan terhadap kebijakan politik yang diterapkan. Gerakan ini diwujudkan dengan serangkaian dibentuknya organisasi-oragnisasi Muslim, seperti CMYM, CMYA, Al-Qibla dan *The Call of Islam* yang menentang dengan keras praktik penindasan rezim apartheid. Adapun landasan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber.

**Kata Kunci:** Afrika Selatan, Politik Apartheid, Muslim Minoritas.

**Abstract:** This thesis aims to describe and analyze: (1) The history of the emergence of apartheid politics in South Africa, and (2) The contribution of Muslims in opposing the apartheid regime in South Africa with the period 1948-1994. This type of research focuses on library reseach. Some of the steps used in researching the object of study are heuristics, verification, interpretation, and historiography or what is often referred to as historical research methodology. The results of this study show that: *First*, apartheid politics officially lasted for forty-two years (1948-1990). This is against the backdrop of a white group that feels that it is superior to the black group that is seen as slaves, servants. Apartheid, which means separation, was formed with the aim of maintaining the purity of his race, so that to realize it Malan who won the 1948 elections made a kind of political policy strategy that later developed into discrimination against blacks. *Second*, The policy of implementing apartheid politics that oppresses many blacks, including Muslims, triggers resistance and resistance to the political policies implemented. This movement was realized by a series of Muslim organizations, such

as CMM, CMA, Al-Qibla and The Call of Islam that strongly opposed the practice of oppression of apartheid regimes. The foundation of thinking used in this study refers to Max Weber's theory of social action.

**Keywords:** South Africa, Apartheid Politics, Minority Muslims.

## PENDAHULUAN

Diskursus dalam sejarah Islam, Afrika Selatan boleh dikatakan sebagai kawasan yang kurang untuk mengatakan tidak sama sekali dipertimbangkan dalam wilayah perkembangan dan pemikiran Islam. Seperti Islam di Asia Tenggara, atau kawasan-kawasan di luar Jazirah Arab dan Afrika bagian Utara. Afrika Selatan kerap kali ditempatkan sebagai periferi dalam studi-studi keislaman (Muhtadi, 2002). Di Benua Afrika, Afrika Selatan menjadi salah satu benua tertua. Banyak suku yang tinggal, sebagaimana suku San, suku Khoikhoi, dan suku Nguni. Ketiga suku tersebut merupakan penduduk asli. Namun, bila yang disebut penduduk Afrika Selatan, maka yang dimaksud adalah suku Nguni. Hal ini disebabkan oleh suku Nguni yang pada periode selanjutnya berprofesi sebagai peternak dan petani menguasai jumlah populasi di Afrika Selatan (Iswahyudi, 2012: 143).

Umat Islam mulai menduduki wilayah Afrika Selatan bisa dilihat dari dua arah dalam dua periode yang berbeda. Arus pertama (1652-1807) datang setelah penjajah pertama (Belanda) tiba di Cape Town. Para imigran ini datang dari berbagai bagian Timur, termasuk pekerja, tahanan politik, penjahat dan budak. Penduduk lokal yang masuk Islam disebut "Melayu", meskipun kurang dari 1% dari mereka berasal dari negara-negara Melayu seperti Indonesia dan Malaysia (Iswahyudi, 2012: 143). Periode kedua muncul pada tahun 1860-1914. Mereka adalah pekerja upahan dari India, dan ada pula yang beragama Hindu (Esack, 2000: 46).

Politik apartheid muncul secara resmi di Afrika Selatan pada awal abad ke-20, yaitu pada saat berdirinya negara Uni Afrika Selatan pada tahun 1910. Babak baru politik apartheid terjadi pada tahun 1948, yaitu ketika Partai Nasional (*National Party*) yang dipimpin oleh Dr. Malan memperoleh kursi parlemen dan memenangkan pemilu. NP membuat strategi, suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras (Budiman 2012, 1: 17).

Selama kampanye, *National Party* atau Partai Nasioanl mempromosikan slogan "apartheid," yang berarti pemisahan. Dari kemenangan ini lahirlah undang-undang yang mengatur kehidupan kulit hitam di Afrika Selatan. Strategi-strategi tersebut kemudian diterapkan pada sejumlah peraturan: 1) Pelanggaran pernikahan antar ras yang berbeda warna kulit (1949), 2) Pengkategorian penduduk berdasarkan ras (1950), 3) Pelanggaran hubungan seksual antara orang kulit putih dengan orang-orang dari ras lain (1950), 4) Pemisahan rasial atas orang kulit putih dengan orang dari ras lain dalam fasilitas publik (1953). Peraturan ini dilakukan oleh pemerintah atas dasar kepentingan negara, stabilitas politik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi (Fakhriansyah, 2021).

Kebijakan apartheid yang diterapkan di Afrika Selatan telah menimbulkan reaksi dan kritik keras di dalam dan luar negeri. Muncul organisasi ANC (Kongres Nasional Afrika) yang mengkritik implementasi rezim apartheid. ANC didirikan pada 8 Januari 1912, dengan misi untuk membela hak asasi manusia dan bergerak untuk menegakkan keadilan dari rezim yang menindas. Reaksi dan kritik bukan hanya dilakukan oleh mayoritas Kristen di Afrika Selatan, umat Muslim Afrika Selatan juga berperan dalam menentang tindakan yang bertujuan untuk penghapusan politik desegregasi (Wardhana, 2020).

Salah satu tokoh Muslim yang gencar melakukan perlawanan terhadap rezim apartheid adalah Ahmed Kathrada yang lahir pada tahun 1929 dan wafat pada tahun 2017. Kathrada merupakan Muslim Afrika Selatan yang berasal dari keturunan Muslim India. Ia bersama tokoh aktivis-anti apartheid lain, seperti Walter Sisulu, Nelson Mandela, I. C Meer dan J. N Singh tergabung dalam ANC yang gencar melakukan berbagai macam perlawanan terhadap rezim apartheid. Salah satu gerakannya adalah kampanye Defiance pada tahun 1952 atau aksi penolakan terhadap UU Politik Apartehid (Fakhriansyah, 2021).

Selain Ahmed Kathrada, kelompok intelektual muslim di Afrika Selatan juga membentuk beberapa organisasi gerakan muslim, seperti MYM (*Muslim Youth Movement/ Gerakan Pemuda Islam*) yang didirikan di Durban pada tahun 1970, Al-Qibla, MSA (*Muslim South Africa/ Muslim Afrika Selatan*), dan *The Call of Islam* yang didirikan oleh Farid Esack pada tahun 1984. Pada praktiknya, organisasi-organisasi umat muslim berafiliasi dengan UDF (*United Democratic Front/ Front Demokrasi Bersatu*) yang dipimpin oleh Nelson Mandela presiden pertama Afrika Selatan dari ras berkulit hitam yang menjabat sejak 1994-1999. UDF terbilang organisasi pergerakan keagamaan yang paling aktif dalam memobilisasi aktivis anti-apartheid di kalangan pemuda dan umat buruh serta menggalang usaha antar-iman (Saryono, 2006: 43-44).

Studi tentang kontribusi Muslim minoritas seperti uraian yang telah dipaparkan di atas dalam kajian sejarah kebudayaan Islam minoritas masih kurang mendapat perhatian, dibandingkan dengan kajian-kajian tentang perkembangan Islam di wilayah-wilayah benua Eropa, hingga Afrika yang dalam perkembangannya umat Muslim terbilang minoritas. Atas dasar alasan tersebut, penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan perjalanan dan dinamika Muslim minoritas dalam menentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Penelitian ini, secara sengaja difokuskan untuk mengeksplorasi secara selektif terhadap perjuangan umat Muslim minoritas di Afrika Selatan, baik terhadap tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh, atau kontribusi keorganisasian yang dibentuk umat Muslim dan pergerakannya yang dilakukan dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1994. Penelitian ini memusatkan pada studi pustaka. Adapaun nantinya dapat digunakan sebagai sumbangan tertulis berupa pengetahuan ilmiah untuk menambah khazanah Islam terutama pada konsentrasi Sejarah Muslim Minoritas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library reseach*). Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian sejarah. Para ahli ilmu sejarah telah bersepakat dalam menetapkan empat kegiatan pokok untuk meneliti sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Keempat tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)**

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis Farid Esack yang berjudul *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme dan Pluralisme*. Buku ini merupakan buku otobiografi komprehensif. Dalam hal ini Farid Esack menuliskan sejarah persnolanya, sebagai salah satu saksi hidup yang mengalami masa-masa penindasan yang dilakukan oleh rezim apartheid Afrika Selatan. Dengan salah satu sumber inilah peneliti dapat menggambarkan kehidupan masyarakat kulit hitam, khususnya umat Muslim di Afrika Selatan pada masa rezim apartheid. Adapaun data-data literatur sekunder yang digunakan dalam peneneelitian ini adalah berupa buku; seperti Darsiti Soeratman *Sejarah Afrika*, Siti Maryam *Sejarah Peradaban Islam*, dan buku lainnya. Berupa jurnal-jurnal; seperti Agus Budiman *Politik Apartheid di Afrika Selatan* dan lain sebagainya. Serta artikel yang dianggap kevalidannya seperti *tirto. Id*, *Islam Lib* dan lainnya yang dianggap kredibel sesuai dengan topik penelitian, juga artikel-artikel yang bersumber dari website Afrika Selatan, seperti *Saho* atau *South African History Online* serta *Britannica*.

### **2. Verifikasi (Kritik Sumber)**

Peneliti telah menguji berbagai sumber yang terkumpul, seperti contoh buku *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberaslime, Pluralisme* yang diterjemahkan oleh Watung A. Budiman tahun 2000, dan diterbitkan oleh Mizan Media Utama (MMU) Bandung. Penulis buku aslinya adalah Farid Esack dengan judul asli *Qur'an, Liberation, & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligiuous Solidarity against Oppression* yang diterbitkan di Oneworld, Oxford Inggris pada tahun 1997. Begitu juga dengan jurnal yang peneliti dapatkan, seperti "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (Islam di Afrika Utara dan Afrika Selatan)" yang ditulis oleh Marzuenda yang diterbitkan dalam Kreatifitas Jurnal Pendidikan Islam ISSN 2460-9870. Online 2807-1883 Volume 10 Nomor 1. Maret 2021- Agustus 2021.

Pada tahap kritik intern, digunakan untuk memperoleh sumber yang kredibel dengan cara membandingkan sumber satu dengan sumber yang lain, baik pada tahun-tahun kejadian dan tempat kejadian serta nama-nama tokoh pelaku sejarah. Ketika peneliti menemukan perbedaan dalam tahun kejadian ataupun tempat kejadian terkait sumber yang di dapat, peneliti lebih condong dan memilih sumber primer daripada sekunder. Pada informasi sumber sekunder tersebut kiranya kurang tepat atau terbukti jika CMYA berdiri pada 1957. Hal ini yang harus dilihat dan dianalisis adalah sebab terbentuknya CMYA. Pada saat UU Akta Wilayah diterapkan oleh rezim apartheid, masyarakat kulit hitam dipaksa pindah. Sekitar tahun 1958,

membuat masyarakat Muslim merasa terusir dari rumahnya, sehingga dari buntut tersebut terbentuklah CMYA sebagai upaya perlawanan terhadap apartheid (Esack, 2000: 57).

### 3. Interpretasi (Analisis Sumber)

Dalam langkah ini, peneliti berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta-fakta sejarah mengenai kontribusi Muslim minoritas di Afrika Selatan dalam menggulingkan rezim apartheid tidak sekedar menduga-duga. Dari berbagai sumber yang telah di verifikasi kekredibilitasnya, kemudian peneliti menganalisis secara terminologis. Inilah yang disebut dengan interpretasi atau analisis sumber.

### 4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Pada tahap ini merupakan fase terakhir dalam metode penelitian sejarah untuk penulisan sejarah. Menulis penelitian sejarah tidak hanya sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian. Melainkan memaparkan hasil-hasil penelitian, kemudian ditulis dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui sumber data yang telah terkumpul.

## **MUNCULNYA POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN**

Diskriminasi rasial tentunya menjadi salah satu problem yang sangat besar, dan yang paling dominan. Diskriminasi rasial terjadi dan dialami masyarakat Afrika Selatan yang dikenal dengan istilah "Apartheid" yang diberlakukan secara resmi oleh pemerintahan pada tahun 1948. Hal ini bermula pada saat pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1948 yang hanya diikuti oleh penduduk kulit putih. Partai Nasional membuat strategi-strategi sebagai upaya untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi masyarakat kulit putih dan diskriminasi ras. Pemilu tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Dr. Daniel Francois Malan dengan program Politik Apartheid (Susanti, 2011: 27-28). Selama masa kampanye, Partai Nasional mempopulerkan slogan "Apartheid" (Fakhri, 2021).

Apartheid adalah kata dalam bahasa Afrikaans, yaitu *Apart* yang berarti memisah dan *Held* yang berarti sistem atau hukum. Dengan kata lain, politik apartheid berarti "pemisahan", yaitu pembagian masyarakat kulit hitam berdasarkan sistem kesejahteraan yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih. Hal ini didasarkan atas diskriminasi terhadap masyarakat non-kulit putih dan dikuatkan oleh undang-undang. Dalam praktik kebijakan apartheid, mayoritas orang kulit hitam dipisahkan dan tidak dipandang memiliki hak ekonomi dan politik yang sama dengan minoritas kulit putih, bangunan umum, transportasi umum, taman, restoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan gereja. Setiap lingkungan kota atau desa juga dibagi menjadi dua sistem sekolah yang terpisah, dengan tingkat guru yang berbeda, dan hanya orang kulit putih yang memiliki hak untuk memilih (Haba, 2007: 51-52).

Apartheid dapat diartikan sebagai sistem dan kebijakan hukum yang menekan hak-hak kulit hitam, baik dalam ranah pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Inti dari apartheid adalah bahwa setiap kelompok harus berkembang secara terpisah dan

memperoleh otonomi lokalnya sendiri. Ini dijelaskan dalam empat cara. Yaitu, stratifikasi populasi berdasarkan ukuran warna kulit, putih, hitam, dan Asia (Kustiwa, 2020: 9).

Program yang kemudian dirancang oleh Dr. Daniel Francois Malan tersebut justru didukung oleh masyarakat kulit putih yang tentu bertujuan mempertahankan kemurnian rasnya (kulit putih) di Afrika Selatan. Sejarawan Kirdi Dipudoyo menjelaskan bahwa secara teori kebijakan apartheid berusaha mempertahankan identitas rasial kelompok kulit putih. Implementasi yang konsisten akan menuntut wilayah terpisah untuk setiap kelompok warna kulit (Haba, 2007: 51).

Dengan demikian, diskriminasi di Afrika Selatan banyak terjadi akibat rasisme terhadap non-kulit putih. Arsitek apartheid, Dr. Hendrik Felward, menerapkan ideologi apartheid melalui undang-undang yang lebih ketat selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Afrika Selatan.

Rasisme di Afrika Selatan nyata bahkan sebelum Partai Nasional memenangkan pemilu 1948. Kronologis atau latar belakang munculnya rasisme di Afrika Selatan dapat ditelusuri melalui kolonialisme dan imperialisme yang dipraktikkan oleh bangsa Eropa, yaitu Belanda dan Inggris. Karena kekuatan politik penguasa kolonial, orang kulit hitam tidak memiliki perwakilan di lembaga-lembaga negara Afrika Selatan. Sampai pertengahan abad ke-20, sejarah agresi dan populasi serta dominasi kulit putih pada dasarnya sama di sebagian besar dunia. Kolonial yang unggul secara ekonomi dan teknologi, tentara mereka menaklukkan masyarakat pribumi tanpa kesulitan, secara bertahap memperoleh hak istimewa dan status khusus. Akibatnya, posisi mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk menyebarkan kekuatan politik berdasarkan kekuasaan (Dipuyodo, 1983: 72).

Penjajah Belanda datang ke Afrika Selatan dari pertengahan abad ke-17, ketika Belanda masih menjadi mitra dagang yang kuat. Perusahaan perdagangan atau VOC, mendominasi kawasan komersial yang luas di sekitar Samudra Hindia. Pada 16 April 1652, Jan Van Riebeeck dan pasukan 90 mendarat di Tanjung Harapan (sekarang Cape Town) yang diperintah oleh Dewan Tujuh Belas (*de Heeren XVII*) dari delapan perwakilan kota pelabuhan niaga di Belanda. Dalam menjalankan tugasnya (Sadirman, 23), VOC memiliki beberapa kekuasaan dan hak, antara lain:

- a) melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan dan Selat Magelhaens;
- b) pembentukan tentara sendiri;
- c) berperang;
- d) membuat perjanjian dengan raja setempat
- e) mencatat dan menerbitkan mata uang sendiri;
- f) mempekerjakan karyawannya sendiri;
- g) pemerintahan kolonial;

Sejak penguasa kolonial tiba di Afrika Selatan, mereka merasa lebih unggul dari penduduk asli. Jan Van Riebeeck membedakan antara orang Afrika Selatan yang beradab dan

tidak beradab, sedangkan pemukim Belanda membedakan antara orang kulit putih dan kulit hitam (mereka dibedakan berdasarkan ras, warna kulit). Selain itu, pemukim Belanda membentuk masyarakat berdasarkan sistem yang disebut *master-servant* yaitu pelayan dan tuan. Disebut tuan adalah mereka para kolonis kulit putih yang memiliki hak-hak istimewa. Sedang yang disebut pelayan adalah mereka penduduk pribumi yang berkulit hitam yang dibebani juga dengan kewajiban-kewajiban yang tidak sedikit (Soeratman, 2012: 353).

Selain itu, mengenai agama Kristen, pertanian dan kekayaan disamakan dengan orang kulit putih, sedangkan penyembahan berhala, kemiskinan, dan perbudakan disamakan dengan orang kulit hitam. Pelayan atau abdi adalah mayoritas yang diperintah, dan tuan adalah minoritas kulit putih yang dominan dan memerintah. Untuk mempertahankan kedudukan status kulit putih, maka mereka mempertahankan, atau bahkan melarang, asimilasi antara dua ras. Bahkan pada 1685, Boer atau Belanda mengeluarkan undang-undang resmi yang melarang pernikahan antar ras, pernikahan antar dua ras tidak diizinkan. (Soeratman, 2012: 353-354).

Kedatangan Belanda di Cape Town memicu konflik antara penduduk asli, suku Khoikoin berkulit kuning, dan pemukim dari Belanda. Dari sinilah hubungan dagang yang semula berjalan baik antara ras Khoikoin dengan Belanda menjadi renggang. Hal ini dipicu oleh orang-orang Khoikoin yang ingin merebut kembali wilayah pertanian dan perternakan mereka yang telah diambil alih oleh Belanda. Pertentangan tersebut sangat tidak seimbang, karena para kolonis Belanda yang bermukim sudah menggunakan senjata, sedangkan ras Khoikoin hanya bersenjata panah dan busur. Hanya beberapa tahun kolonis Belanda bermukim di Afrika Selatan, pola-pola rasial dan diskriminasi telah dibentuk (Haba, 2007: 56-57), seperti yang telah dijelaskan di atas, sistem pelayan dan tuan.

Pemukim dari Belanda selanjutnya menyebut dirinya dengan julukan Boer, yang berarti petani. Seperti yang telah dijelaskan di atas, mereka orang Boer tidak merasa sebagai bagian orang Belanda, bahkan orang-orang Boer menggunakan bahasa inovatif yang kemudian berkembang yang disebut Afrikaans. Maka, masyarakat kulit putih yang pertama tinggal di Afrika Selatan berasal dari orang-orang Boer, dan bila dikatakan Boer yang dimaksud adalah Afrikaner. Sejak kedatangan Inggris di Afrika Selatan pada tahun 1795 dan mampu mendesak Boer pada 1812. Periode selanjutnya orang-orang Inggris banyak yang melakukan imigran ke Cape Colony. Sehingga pada tahun 1814 Inggris memerintah di atas masyarakat Boer. Hal ini terjadi sebagai akibat dari Konvensi London, yaitu wilayah Cape Colony (sekarang Cape Town) tidak dikembalikan oleh Inggris kepada pemerintah Belanda. Maka orang-orang Boer sangat marah terhadap koloni Inggris tersebut dan pada proses berikutnya Inggris dan Boer terlibat dalam pertikaian yang besar (Haba, 2007: 57).

Kedua koloni tersebut saling merebutkan wilayah-wilayah di Afrika Selatan, sehingga perebutan tersebut berujung pada perang besar yang disebut dengan "Perang Boer" yang terjadi antara tahun 1899-1902. Pada Perang Boer tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Inggris, dan Belanda mengalami kekalahannya pada Mei 1902 dan menyerah kepada Inggris. Perang Boer yang berlangsung selama dua kali, membuktikan bahwa Inggris menginginkan

wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Afrikanner. Afrika Selatan kemudian terbelah dua, dengan jajahan Belanda (Boer) di utara dan jajahan Inggris di selatan. Di selatan, Inggris mendirikan pemerintahan di Natal dan Cape Town sebagai koloni. Di sisi lain, *Freitstadt Oranye* dan bagian utara *Transvaal* didirikan oleh koloni Belanda (Boer) (Susianti, 2011: 2).

Kendati masing-masing telah memiliki bagian, konflik peperangan masih terus berlanjut dan berlangsung hingga tahun 1910. Hingga pada akhirnya Boer benar-benar dikalahkan oleh Inggris, maka seluruh wilayah Afrika Selatan menjadi milik Inggris. Pada tahun 1910 jugalah dibentuk Uni Afrika Selatan yang terdiri dari empat provinsi; Cape Town, dan Natal yang berorientasi Inggris dan dua provinsi bekas bangsa Boer yang memiliki tradisi dan tata hidup sendiri (Soeratman, 2012: 352).

Pemerintah Inggris pada saat itu menginginkan keempat bekas koloni itu menjadi sebuah federasi dan berharap untuk menumpas rasisme Afrikaner yang ekstrim. Tujuan Inggris adalah untuk memperluas liberalisme ke negara-negara bagian utara. Namun yang benar-benar terbentuk bukanlah federasi, melainkan Uni (koalisi/ gabungan), sikap dan psikologi utara yang mengutamakan prinsip ketimbang liberalisme yang berlaku di utara, yaitu *No equality in Church and State* (tidak ada kesetaraan dalam gereja dan negara) meluas hingga ke selatan (Soeratman, 2012: 345).

Setelah pembentukan Uni di Afrika Selatan, pemerintah Inggris melakukan ratifikasi oleh parlemen Inggris di London. Di bawah *State of the Union Act* yang diperkenalkan pada tahun 1910, Luis Botha terpilih sebagai Perdana Menteri (1910-1919), dan dia memilih Cape Town sebagai kursi parlemen, Pretoria sebagai pusat administrasi negara, dan Bloemfontein sebagai kursi parlemen Mahkamah Agung. Pada saat pembentukan Uni Afrika Selatan, Inggris terbuka bagi orang Afrikanner untuk memperluas nasionalisme mereka ke semua bagian Persemakmuran Afrika Selatan, baik di wilayah pendudukan Inggris di Natal dan Cape Town.

Dengan terbentuknya Uni tersebut, justru menjadi kemenangan bagi Afrikanner. Sebab, sebagian besar anggota parlemen pusat adalah orang-orang Afrikanner. Disamping itu, jabatan perdana menteri juga dipegang oleh orang-orang Afrikanner: Pertama, oleh Jendral Louis Botha (1910-1919), ia adalah pejuang gigih melawan Inggris dalam perang Boer. Kedua, diganti oleh Jendral Smuts (1919-1924), ia adalah teman seperjuangan Louis Botha baik dalam perang Boer maupun dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Uni Afrika Selatan. Berikut beberapa perdana menteri antara lain: Herzog (1924-1940), Malan, Strijdom, dan semuanya adalah orang-orang Afrikanner (Soeratman, 2012: 361-364).

Smuts, semula adalah mantan menteri dalam negeri dan pertambangan pada masa kepemimpinan Luis Botha (1910-1919), ia juga pernah menjabat sebagai menteri pertahanan pada 1912-1913. Selanjutnya setelah Botha lengser sebagai perdana menteri, Smuts menggantikannya selama lima tahun, dari 1919-1924. Pada priode berikutnya, Smuts mengalami kekalahan dalam pemilu tahun 1924 dengan oposisinya, yaitu Herzog yang bekerjasama dengan *Afrikanner Nationalist* dan mampu mengalahkan Smuts.

Herzog menjabat sebagai perdana menteri selama enam belas tahun, dari 1924-1940. Namun pada kepemimpinannya, Herzog tidak berhasil melepaskan Uni Afrika Selatan dari ikatan *commonwealth* (pesemakmuran) Inggris. Hal ini disebabkan oleh pendukung Partai Buruh (*Labour Party*) yang menolak gagasan Herzog dan pada umumnya, mereka masyarakat kulit putih lebih pro dengan lingkungan *commonwealth* Inggris. Kemunduran kepemimpinan Herzog terjadi pada tahun 1929, mereka kaum nasionalis mengobarkan semangat rasionalisme putih dengan mengkampanyekan slogan *South Africa a White Man's Country*, yang artinya adalah Afrika Selatan negara orang kulit putih. Selain itu, pada 1930 terjadi krisis ekonomi dunia dan Afrika Selatan terkena dampaknya. Sehingga untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, Herzog berkoalisi dengan Smuts pada tahun 1933 (Soeratman, 2012: 364-365).

Tindakan tersebut justru menimbulkan perpecahan internal partai *Afrikanner Nationalist*. Sehingga Dr. Malan dari kaum nasionalis memisahkan diri dari kerjasama partai dan mendirikan Partai Nasional. Ia menyatakan tegas sebagai lawan politik Herzog. Pada 1934, Herzog dan Smuts berkoalisi mendirikan Partai Kesatuan (*Unity Party*) sebagai tandingannya. Pada saat Perang Dunia II, Herzog dan Smuts berselisih paham mengenai sikap Uni Afrika Selatan terhadap perang dunia. Smuts berpandangan agar Afrika Selatan ambil andil bergabung bersama Inggris dan Prancis, sedangkan Herzog lebih memilih netral. Namun pandangan Herzog mengalami kekalahan dalam siding parlemen dengan suara 67 melawan 80 pendukung Smuts. Pada tahun 1942, Herzog meninggal dunia dan jabatan perdana menteri diserahkan kepada Smuts (Soeratman, 2012: 365-367).

Dari uraian di atas, dapat digambarkan dengan jelas bahwa latar belakang atau kronologis terjadinya rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan telah dimuali sejak awal oleh para bangsa Eropa atau kolonial, yaitu bangsa Belanda (Boer/Afrikanner). Sejak kedatangannya di Afrika Selatan, mereka memisahkan dirinya dari tanah airnya dan menganggap bahwa negeri jajahan mereka sebagai satu-satunya tanah air mereka. Sejak awal pula, mereka telah membuat sistem pemisahan atau apartheid berdasarkan ras dan warna kulit. Melalui prinsip aristokrasi putih dengan sentiment rasial dan menginginkan Afrika Selatan sebagai *white man's land* (daerah kulit putih). Aristokrasi dalam KBBi adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum bangsawan atau kaum ningrat. Jadi inti dari prinsip aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang terpilih karena moralitas maupun kemampuan intelektualitasnya (KBBi Online, 2022).

Babak baru politik Apartheid terjadi setelah kepemimpinan Smuts mengalami banyak masalah. Sebagai sekutu Inggris dan Prancis, keduanya tidak dapat diciptakan. Masalah dalam negeri dihadapkan kepada masalah masyarakat kulit berwarna, orang-orang India dan kaum nasionalis. Namun pada pemilu 1943, Smuts memegang jabatan kembali dengan kemenangannya dari 1943-1948. Terjadinya permasalahan-permasalahan dalam negeri dengan masyarakat kulit berwarna beralasan pada tindakan politik yang diambil oleh Smuts, bahwa mereka masyarakat putih akan dipisahkan dari daftar pemilu. Sehingga masyarakat

kulit berwarna merasa khawatir dan mereka merasa ditolak dari masyarakat kulit putih, Afrikanner.

Sehingga pada pemilu tahun 1948, Smuts melalui Partai Kesatuan (*United Party*) mengalami kekalahan melawan Partai Nasional (*National Party*) yang dipimpin oleh Dr. Daniel Francois Malan (Selanjutnya Malan). Hal ini disebabkan Smuts kehilangan pendukung, yang disebabkan karena orang Afrikanner mulai curiga dan menganggap politik Smuts merugikan Afrikanner. Seperti contoh peraturan yang dibuat oleh Smuts, bahwa ia memberi hak kepada orang-orang India untuk memiliki perwakilan dalam bidang politik, padahal sebelumnya dan bahkan selamanya orang India dilarang diberi hak politik. Sehingga hal ini dianggap membahayakan kedudukan orang-orang kulit putih, dan berbalik dengan tujuan Afrikanner yaitu kulit putih harus selalu memimpin. Mereka harus selamanya menjamin supremasi kulit putih dan orang kulit putih lebih baik daripada buntu, berwarna dan orang India (Soeratman, 2012: 369-370).

Dengan demikian, kemenangan Malan seorang ultra nasionalis sebagai perdana menteri pada pemilu 1948 merupakan pemerintahan yang seluruhnya dikuasai oleh *all-Afrikanner*. Ia menjabat sebagai perdana menteri selama enam tahun, dari 1948-1954. Pada masa jabatannya, Malan mampu melepaskan Uni Afrika Selatan dari ikatan *commonwealth* Inggris dan melaksanakan politik Apartheidnya terhadap masyarakat non-Eropa atau masyarakat pribumi non-kulit putih. Kemenangan Malan dalam pemilu 1948 menandai berakhirnya dominasi orang Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa kedua setelah bahasa Afrikaans, bahasa yang dikembangkan oleh orang-orang Boer dari bahasa Belanda dan menjadi salah satu bahasa resmi di Afrika Selatan (Haba, 2007: 81).

Mengenai implementasi kebijakan apartheid, Malan menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan apartheid dapat dicapai dengan membagi negara menjadi dua bagian, putih dan hitam. Tujuan ini didasarkan untuk menjaga kemurnian ras kulit putih. Maka untuk merealisasikan tujuannya, rezim membuat dasar-dasar aturan melalui undang-undang yang rasial dan sangat langka. Juga sebagai aturan yang membatasi ruang gerak masyarakat kulit hitam, dan untuk menguntungkan masyarakat kulit putih. Undang-undang tersebut pada saat Malan menjabat sebagai perdana menteri antara lain ialah; *Land Act*, undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di kawasan pemukiman tertentu. *Group Areas Act*, hukum yang mengatur lingkungan kulit putih dan hitam, dan undang-undang Pendaftaran Kependudukan adalah undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftar menurut etnis mereka (Haba, 2007: 83).

Di antara undang-undang yang diberlakukan oleh rezim apartheid untuk membatasi pergerakan orang kulit hitam, peneliti sajikan sebagai berikut:

a. *The Population Registration Act 1950* (Undang-undang Pendaftaran Penduduk)

Undang-undang yang dibuat tahun 1950 ini dirancang sebagai upaya pemisahan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan warna kulit dan kelompok rasnya, mulai dari orang-orang berkulit putih, kulit hitam, kulit campuran atau berwarna, dan Asia. Tujuan

dari pemetaan ini adalah sebagai upaya untuk tidak terjadinya percampuran antara penduduk. Faktor inilah menjadi masalah utama bagi masyarakat Afrika Selatan, khususnya orang-orang kulit hitam. Dengan demikian, pemerintah jadi lebih mudah memetakan masyarakat dan penerapan seluruh kebijakan mereka yang berbau diskriminatif lebih mudah diterapkan (Pram, 2014: 337).

b. *Group Areas Act 1951* (Undang-undang Area Kelompok)

Undang-undang selanjutnya adalah Area Kelompok atau Akta Wilayah yang diberlakukan pada 1951. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam berdasarkan tempat tinggal. Pemisahan tersebut menyisihkan tanah yang tandus bagi orang-orang kulit hitam, keturunan India dan berwarna. Orang kulit putih tinggal di perkotaan. Undang-undang ini juga membagi setiap meter menjadi area pemukiman, dengan berbagai toko, dan memungkinkan orang-orang dari ras tertentu untuk tinggal, dan berbisnis hanya di area tersebut. Sehingga orang kulit hitam tidak mampu untuk mengembangkan bisnisnya (Esack, 2000: 24).

Penerapan undang-undang ini berdampak pada kemlaratan bagi orang-orang kulit hitam. Esack dalam bukunya (2000) *al-Qur'an Liberalisme dan Pluralisme* menggambarkan secara jelas, mereka orang-orang kulit hitam banyak yang berkeliling mengetuk pintu rumah untuk meminta sepotong roti, atau-bahkan mereka mengaduk-aduk tempat sampah demi mencari sisa makanan. Inti dari undang-undang adalah semua ras hanya boleh berdomisili di titik-titik wilayah yang telah dipetakan pemerintah. Bahkan, mereka orang kulit hitam dilarang keluar dari daerahnya masing-masing. Jika keluar dianggap telah melanggar hukum, dan dijerat sanksi atau hukuman (Pram, 2014: 338).

c. *Pass Law Act 1952* (Undang-undang Kartu Tanda Pengenal)

Undang-undang ini atau juga disebut Passbook diterapkan kepada rakyat Afrika Selatan yang sudah menginjak usia 16 tahun, baik pria ataupun perempuan. Passbook ini berukuran buku kecil atau seperti kartu identitas yang bentuknya seperti paspor, di dalamnya terdapat foto beserta keterangan tentang pemilik passbook. Keterangan tersebut seperti dimana tempat pemilik tinggal, diijinkan serta dimana pemilik passbook itu bekerja (Haba, 2007: 106).

Undang-undang ini mewajibkan kepada masyarakat kulit hitam untuk memilikinya. Kemanapun mereka pergi passbook tersebut harus dibawa. Petugas sewaktu-waktu akan mengadakan pemeriksaan terhadap passbook, jika dalam pemeriksaan petugas tidak menemukan passbook, mereka akan ditangkap dan dihukum. Sedangkan mereka orang kulit putih tidak perlu membawa passbook kemanapun mereka pergi. Sehingga undang-undang membuat ruang gerak masyarakat kulit hitam semakin sulit, terutama untuk bisa memasuki wilayah perkotaan terlebih wilayah-wilayah orang kulit putih. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menjamin pemisahan atau pengendalian terhadap orang kulit hitam apabila mereka melakukan perlawanan-perlawanan (Susianti, 38-39).

d. *Bantu Education Act* 1953 (Undang-undang Pendidikan Bantu)

Undang-undang pendidikan Bantu dibuat oleh rezim apartheid sebagai segregasi (pemisahan) antara masyarakat kulit putih dan kulit hitam. Perbedaan ini dibuat dalam rangka perbedaan dan cita-cita pendidikan. Untuk kulit hitam diberi pendidikan teknik, dilengkapi kerja praktik, dan bahkan pemerintah menerapkannya secara paksa agar masyarakat kulit hitam mau menerima serta bahasa yang digunakan dalam bahasa sekolah adalah bahasa Afrikaans. Sedangkan pendidikan bagi masyarakat kulit putih diarahkan sebagai kerja elit dan kerja profesional. Pemerintah sangat berupaya dan menjaga jangan sampai orang-orang kulit hitam menerima pendidikan untuk kedudukan-kedudukan yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Pada 1959 disusul dengan Undang-undang Universitas terpisah (*Separate University Act*) yang dibuat sebagai upaya segregasi pendidikan tinggi bagi orang kulit hitam (Dipoyudo, 1983: 76).

Dari uraian yang telah digambarkan di atas, dapat dijelaskan bagaimana keadaan sosial masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan yang mengalami diskriminasi rasial atas diterapkannya politik apartheid oleh Malan setelah kemenagannya pada pemilu 1948. Parahnya diskriminasi tersebut dikuatkan dengan undang-undang yang dibuat oleh rezim antara 1948-1990 untuk melancarkan strateginya untuk terus berkuasa di tanah Afrika Selatan dan membuat sempit ruang gerak yang dapat dilakukan masyarakat kulit hitam. Sehingga dapat dijelaskan, bahwa inti dari politik apartheid adalah orang kulit putih harus selalu lebih unggul dari orang kulit hitam, campuran maupun India dan Asia yang tinggal di negara Uni Afrika Selatan. Tujuannya adalah untuk menjamin supermasi kulit putih selamanya. Dalam bahasa kaum Nasionalis (orang Boer) selalu mengatakan *De wit man moet altyd basss wess*, yaitu orang kulit putih selamanya harus memimpin.

### **GERAKAN MUSLIM MINORITAS AFRIKA SELATAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENGGULINGAN REZIM APARTHEID**

Agama Islam datang sebagai minoritas, minoritas ini berupa satu orang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan kualitas satu orang tersebut, Islam dapat tumbuh dan berkembang ke berbagai negara, salah satunya Islam masuk dan berkembang di Afrika Selatan. Perkembangan Islam yang santun dan bersifat akomodatif terhadap budaya lokal membuat Islam mudah tersebar dan diterima di berbagai penjuru. Meskipun terkadang terjadi peperangan, namun jika ditelusuri lebih dalam peperangan tersebut bukan untuk tujuan keagamaan, melainkan lebih ke tujuan politis (Wicaksono, 2020: 46).

Untuk membahas kejelasan Muslim minoritas atau minoritas Muslim di Afrika Selatan, kiranya perlu mendefinisikan istilah minoritas Muslim. Ali Kettani (2005: 3) dalam bukunya menjelaskan secara konseptual bahwa minoritas Muslim adalah bagian dari penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya karena kelompok-kelompoknya mengakui Muhammad putra Abdullah menjadi utusan Allah terakhir, dan meyakini ajarannya adalah benar, dan sering mendapat perlakuan berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan yang sama.

Oleh karena itu, terhadap minoritas tersebut, kelompok-kelompok yang memiliki ciri berbeda sebagai Muslim harus menyadarinya dan harus memiliki solidaritas yang kuat.

Mengenai terbentuknya minoritas Muslim di suatu wilayah, banyak minoritas Muslim terbentuk oleh tindakan-tindakan perorangan, seperti imigrasi seorang Muslim ke negara non-Muslim di negeri non-Muslim. Adapaun pola perkembangan terbentuknya minoritas Muslim diantaranya adalah; *Pertama*, suatu kelompok yang jumlahnya rendah dibandingkan kependudukan non-Muslim. Ketika kependudukan tersebut berlangsung lama, bentuk mayoritas diubah menjadi minoritas dalam jumlah karena pengusiran orang-orang Muslim dalam skala besar. Ditambah adanya imigrasi non-Muslim dan peningkatan yang rendah di kalangan Muslim karena kondisi yang sulit yang abnormal.

*Kedua*, bentuk lain minoritas Muslim yang sedikit berbeda dengan pola sebelumnya. Masalah lain merupakan kasus ketika pemerintahan Muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama, atau usaha untuk menyebarkan Islam tidak cukup hebat dan efektif untuk mengubah Muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai. Ketika kekuasaan politik Muslim tumbang, maka pemeluknya mendapati dirinya turun status menjadi minoritas dalam negerinya sendiri.

*Ketiga*, yaitu bentuk minoritas Muslim yang terjadi ketika sejumlah orang non-Muslim di lingkungan non-Muslim berpindah agama menjadi Islam. Jika pemeluk Islam tersebut sadar akan pentingnya keyakinan Islam dan memberikan prioritas dan ciri-ciri dan mencapai solidaritas yang kuat karena memiliki keyakinan yang sama, maka terbentuklah pola minoritas Muslim yang baru. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh arus imigran dan arus Muslim *muallaf* yang menyatu untuk membentuk suatu minoritas Muslim yang beradaptasi dengan baik dengan budaya setempat dan masih terkait dengan saudara Muslim (Kettani, 2005: 6-7).

Kaitannya dengan pola terbentuknya minoritas Muslim yang telah peneliti jelaskan, minoritas Muslim di Afrika Selatan terbentuk dengan pola perkembangan minoritas ketiga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Islam mulai berkembang di Afrika Selatan dibawa oleh para imigran (1685) yang didatangkan pada saat penjajahan Belanda berkuasa. Artinya minoritas Muslim Afrika Selatan dapat dijelaskan melalui dua tahap; pertama tanah-tanah Muslim telah ditaklukan oleh kekuatan penjajah ditambahkan ke dalam unit-unit yang lebih besar di mana mereka menjadi minoritas. Sehingga gerakan pindah agama dari penduduk non-Muslim di lingkungan non-Muslim (Afrika Selatan) memeluk Islam. Pola tersebut kemudian membentuk ciri-ciri dan mencapai solidaritas yang kuat. Ciri-ciri tersebut dibangun dengan kelompok Muslim yang membangun masjid sebagai basis pertama dalam mencapai kesolidan, sehingga umat Muslim awal yang baru memeluk Islam memiliki keyakinan yang kuat.

Hal ini sesuai dengan terbentuknya sub-kelompok pada awal kedatangan Islam di Cape Town Afrika Selatan. Kemudian berangsur-angsur kelompok tersebut mengembangkan solidaritasnya yang disebut sebagai "komunitas berwarna" yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf beserta 49 pengikutnya. Walaupun ruang gerak Syaikh Yusuf sebagai buangan politik di Afrika Selatan sangat terbatas, Muslim di Cape Town Afrika Selatan mampu tumbuh subur dan

berkembang. Syiar atau penyebaran yang dilakukan oleh Syekh Yusuf pada awal ditujukan kepada para imigran yang dibuang ke Cape Town. Dalam mempertahankan keimanan dan identitasnya, minoritas tersebut mampu melakukan tindakan-tindakan yang progres. Terbukti dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, dari 15.099 menjadi 120.000 jumlah Muslim (Esack, 2000: 47-51).

Demikianlah awal terbentuknya kelompok minoritas Muslim di Afrika Selatan. Kelompok-kelompok tersebut yang memiliki ciri berbeda dalam keyakinannya mampu bertahan dengan solidaritas kuat yang dibangun dalam kelompoknya. Sebagaimana Islam yang dibawa oleh Syaikh Yusuf mampu beradaptasi dengan baik di wilayah yang notabene dikuasai oleh non-Muslim dengan budaya setempat. Ajaran Islam yang bersifat akomodatif mampu diterima oleh orang lain. Sehingga kelompok Muslim tersebut menyadari akan perbedaan dengan penduduk lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama, maka terbentuklah kelompok minoritas Muslim yang baru.

Politik Apartheid yang diberlakukan sejak kemenangan NP pada tahun 1948 telah menyebabkan adanya perlakuan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, dan parahnya adalah aturan-aturan tersebut dituangkan dalam undang-undang yang telah peneliti jelaskan pada bab dua di atas. Penderitaan dan ketimpangan kemiskinan menjadi salah satu manifestasi nyata bagi masyarakat kulit hitam dan berwarna di Afrika Selatan.

### **1. Pelaksanaan Politik Apartheid Menurut Tokoh Muslim**

Penderitaan yang di alami masyarakat kulit hitam dan berwarna digambarkan oleh tokoh Muslim kenamaan Farid Esack. Ia adalah aktivis anti-apartheid dan tokoh intelektual yang dikenal luas oleh dunia melalui pemikiran-pemikirannya mengenai persoalan agama, politik dan sosial. Menurut Farid Esack, secara garis besar, ada tiga lapis penindasan kemaunisaan yang dihadapi masyarakat Afrika Selatan, tiga lapis penindasan tersebut yaitu: rasialisme, patriarki, dan monopoli (Saryono, 2006: 21).

*Pertama*, rasialisme yang terjadi di Afrika Selatan merupakan dampak diterapkannya kekuasaan rezim apartheid yang berimplikasi pada persoalan politik (Wahid, 2016: 155). Sejumlah peraturan yang membedakan struktur berdasarkan warna kulit: Kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna dan Asia. Pembagian tersebut berdampak pada kebijakan yang di dominasi oleh kulit putih tentang penentuan wilayah tempat tinggal bagi warga non kulit putih. Yaitu aturan yang dibuat pada tahun 1951 tentang Akta Wilayah (*Group Areas Act*). Warga yang berkulit hitam di pindahkan secara paksa di Bonteheuwel, sebuah kota di Cape Town, tanah yang kering dan tandus untuk ditinggali. Dampaknya mereka hidup dalam kemiskinan, terlunta-lunta dan peminggiran secara politik dan kultural dari wilayahnya sendiri (Iswahyudi, 2012:146). Seperti penjelasan yang telah Farid Esack dokumentasikan dalam bukunya:

Kemlaratan ini hanyalah salah satu wujud apartheid di Afrika Selatan. Di sini, pada 1980-an, orang kulit putih, yang jumlahnya hanya seperenam total populasi, memperoleh hampir dua pertiga pendapatan nasional, sementara orang kulit hitam, yang berjumlah hampir tiga perempat total populasi, hanya mendapat seperempatnya. Jutaan pengangguran tidur di

mana saja. Kami tidur dengan perut kosong, bangunan tanpa ada yang dapat dimakan (Esack, 2000: 24).

Dengan diterapkannya aturan tersebut, mayoritas kelompok kulit hitam dan berwarna hampir sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengambilan-pengambilan keputusan politik dan tidak memiliki wewenang masalah ekonomi dan sosial yang sama dengan kulit putih. Tentu kejadian ini menghantui masyarakat Afrika Selatan pada umumnya, di mana orang kulit putih memiliki prioritas yang tinggi untuk mendapatkan wilayah, pekerjaan, pendidikan dan akses-akses kekuasaan politik. Bagi orang-orang kulit hitam yang berada di luar daerahnya melebihi dari 72 jam tanpa izin khusus dari *Native Labour Officer* (Petugas Tenaga Kerja Asli), maka mereka ditahan dan dipenjara (Basri, 2020: 84-85). Demikianlah fungsi dari *Pass Law Act* (1952) sebuah aturan yang dibuat oleh rezim apartheid sebuah passbook atau kartu tanda pengenal. Sehingga membuat ruang gerak masyarakat kulit hitam semakin sulit, terutama untuk bisa memasuki wilayah perkotaan terlebih wilayah-wilayah orang kulit putih.

*Kedua*, yaitu budaya patriarki. Patriarki merupakan perilaku yang mengutamakan laki-laki tenimbang perempuan dalam masyarakat atau kelompok tertentu (KBBI Daring, 2016). Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sebagai kasus paling pahit adalah kasus pemerkosaan terhadap Ibunya Farid Esack, dan kasus ini tidak mendapatkan advokasi serius. Lebih-lebih, kelompok keagamaan tertentu telah memperlakukan perempuan secara tidak adil dan semena-mena. Atas nama agama, mereka meletakkan perempuan pada wilayah domestik dan selalu dipersalahkan bila berhubungan dengan laki-laki (Iswahyudi, 2012: 147).

*Ketiga*, yaitu masalah monopoli oleh kelompok kulit putih. Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu kebijakan rezim apartheid ialah memisahkan dan membagi wilayah berdasarkan stratifikasi warna kulit dalam masyarakat. Orang-orang kulit hitam banyak menempati di daerah perbatasan utara hingga perbatasan timur Afrika Selatan. Daerah-daerah tersebut kemudian disebut dengan *Homelands* (tanah air) atau *Bantustans* (daerah orang hitam). Karena daerah tersebut bersifat otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi di tanah air tidaklah stabil dan baik. Sumber daya di daerah tersebut juga tidak banyak sehingga sudah terlihat, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ditambah dengan pertambahan populasi dan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya, tentu membuat daerah tanah air menjadi padat dan kumuh. Berbeda dengan daerah kulit putih, daerahnya luas dan penduduk sedikit dan ditambah dengan sumber daya yang melimpah, seperti berlian, dan emas (Basri, 2020: 85-86).

## **2. Gerakan Umat Muslim Melawan Apartheid**

Dengan adanya tindakan diskriminatif rasial yang dilakukan oleh rezim apartheid selama berlangsung (1948-1991), tentu membuat masyarakat Afrika Selatan, khususnya kulit hitam dan bahkan berbagai negara banyak mengecam akan tindakan yang dilakukan oleh kulit putih. Meski Islam awalnya merupakan agama yang dinut oleh budak, Islam di

Afrika Selatan justru mampu menunjukkan kekenyalan dalam membangun eksistensi sosial. Kekenyalan sosiologis tersebut membentuk modal sosial yang secara historis menunjukkan bahwa Islam di Afrika Selatan tidak pernah seluruhnya larut dan terserap dalam sistem apartheid. Hal ini terbentuk sebab sebageaian besar orang Islam yang datang ke Afrika Selatan adalah buangan politik dan pejuang kemerdekaan di negeri asalnya (Saryono, 2006: 40).

Hal ini menurut Farid Esack (2006: 41) adalah simpul penting yang menunjukkan umat Muslim di Afrika Selatan memiliki hasrat untuk menantang dengan hukum yang di pandang bertentangan dengan Islam, yaitu ketertindasan, dan kesedian umat Muslim dalam memandang politik dan agama sebagai hal yang berbeda. Meskipun masyarakat kulit hitam hidup dalam kesengsaraan, pada dasarnya masyarakat Afrika Selatan adalah masyarakat yang religius, tetapi sekaligus memiliki pluralitas agama dan sosial yang tinggi. Agama menjadi peranan sosial yang penting terhadap perlawanan dan pembebasan dari rezim apartheid. Untuk itulah nantinya banyak organisasi-organisasi keagamaan yang hadir dalam melawan praktik-praktik yang rasial.

Oleh sebab itu, secara sengaja peneliti akan mengeksplorasi secara selektif terhadap perjuangan dan gerakan-gerakan umat Muslim dalam menentang rezim apartheid, seperti yang peneliti jelaskan diawal, perjuangan tersebut bisa berupa tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh, atau kontribusi keorganisasian yang dibentuk umat Muslim.

#### **a) Perlawanan Ahmed Katharda**

Tokoh Muslim bernama Ahmed Katharda (1929-2017) dikenal sebagai salah satu tokoh anti-apartheid Afrika Selatan. Katharda dikenal dengan julukan Kathy. Ia dikenal luas dengan berbagai aksi dan kritik yang dilakukan dalam menentang politik apartheid lantaran bergabung dengan organisasi *African National Congress* (ANC) atau Kongres Nasional Afrika yang dibentuk sejak lama pada tahun 1912 dengan tujuan membela hak dan kebebasan orang-orang Afrika Selatan. ANC pada saat melaksanakan kampanye pembangkangan, yaitu sebuah protes yang berlandaskan non-kerjasama dan non-kekerasan menentang aturan-aturan yang telah dibuat rezim apartheid. Kampanye ini dimulai dengan melanggar undang-undang di daerah, mulai memasuki daerah-daerah terbatas tanpa izin, berani menggunakan fasilitas khusus kulit putih seperti toilet, kereta api khusus kulit putih, ruang tunggu dan lain-lainnya (Haba, 2007:127).

Kampanye pembangkangan tersebut terjadi pada 26 Juni 1952. Nelson Mandela sebagai salah satu petinggi ANC mengkoordinasikan aksi tersebut dari kantor pusat ANC. Sebelum hari kampanye dimulai, seluruh aktivis anti-apartheid melakukan reli keliling negeri. Ketua ANC bagian Natal, yaitu Luthuli dan Ketua ANC bagian India Natal, Dr. Naicke menyatakan komitmen penuh mendukung aksi kampanye. Nelson pada saat itu ditempatkan sebagai koordinator lapangan untuk berorasi di depan masa aksi pembangkangan yang jumlahnya ribuan (Pram, 2014: 354).

Selain Nelson Mandela, Kathy yang juga tergabung dalam organisasi ANC mengorganisir gerakan kampanye *Defiance* atau pembangkangan pada aksi tersebut, yaitu aksi penolakan terhadap UU yang tidak adil (Wardhana, 2020). Buntut dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh ANC berujung pada penangkapan aktivis anti-apartheid pada tahun 1964. Kathy menjadi salah satu dari delapan dan sebelas terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, termasuk Nelson Mandela dan pimpinan-pimpinan ANC lainnya. Ia menghabiskan 18 tahun di Pulau Robben bersama rekan-rekannya di bagian isolasi yang dikenal dengan "Bagian B", yaitu penjara dengan keamanan maksimum. Nomor tahanannya adalah 468/64. Mereka termasuk Kathy dianggap oleh pemerintah apartheid sebagai pemimpin berpengaruh atau organisasi politik terlarang dipenjara dalam bagian ini (HuffPost, 2017).

#### **b) Perlawanan Imam Abdullah Haron**

Antara tahun 1950 hingga 1960, di saat kekejaman rezim apartheid kian memuncak, dan memberlakukan aturan *Group Area Act* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sebagian kelompok Muslim memilih untuk menjadikan masjid sebagai basis pertama untuk membangun solidaritas dikalangan komunitas kelompoknya. Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial dapat terwujud dengan adanya hubungan antar individu atau kelompok yang didasarkan atas faktor perasaan moral dan kepercayaan yang dianut secara bersama dan diperkuat dengan pengalaman emosional bersama. Dari adanya solidaritas tersebut, dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompoknya (Hidayat, 2021: 8-9).

Pada tahun 1961, lahir sebuah organisasi Islam bernama *The Call of Islam* yang didirikan oleh Imam Abdullah Haron (selanjutnya Imam Haron). Imam Haron (1924-1969) adalah ulama yang aktif berkampanye melawan rasialisme hingga akhir hayatnya. Salah satu mantan anggota organisasi besar anti-apartheid, *African National Congress* bernama Aneex Salie mengatakan tentang Imam Haron, bahwa "Dia tidak cocok dengan pola ulama Muslim yang cukup ritualistik. Dia sangat progresif, jauh melampaui zamannya." (Huda, 2019).

Organisasi yang dipimpin oleh Imam Haron lebih memfokuskan pada perlawanan terhadap segala bentuk penindasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagaimana kelompok-kelompok progresif seperti *The Call of Islam* yang serius dalam masalah takwa di tengah-tengah ketertindasan.

Al-Qur'an menjelaskan perlunya suatu komunitas atau individu untuk melengkapi diri dengan takwa, demi melanjutkan tugas para nabi pada transformasi dan pembebasan (QS. Al 'Imran [3]: 102-105, 125; Al-Anfal [8]: 29) ... Takwa seperti diyakini kelompok Islamis Afrika Selatan, adalah perjuangan untuk tetap teguh dengan komitmen ini disemua dimensinya (Esack, 2000: 125).

Organisasi yang cukup besar tersebut memiliki peranan penting dalam menentang rezim apartheid. Pada saat *The Call of Islam* di deklarasikan, ribuan

selebaran dan poster-poster disebar dan dibaca oleh para pengikut Imam Haron dan ulama-ulama lain untuk membangkitkan perlawanan. Progresifitasnya dalam melawan apartheid tidak hanya dilakukan dalam negeri saja, ketika Imam Haron melaksanakan ibadah haji, sang Imam melobby para pimpinan-pimpinan organisasi Islam dan pemimpin Muslim yang berpengaruh untuk menyaksikan betapa mengerikannya apartheid di Afrika Selatan.

Tidak hanya pemimpin-pemimpin Islam, Imam Haron juga menjalin hubungan rahasia dengan organisasi anti-apartheid non-Islam lainnya seperti ANC, PAC (*Pan Africanist Congress*). Kedua organisasi tersebut gencar sekali dalam melancarkan perlawanan dengan cara lebih keras terhadap supermasi kulit putih. Namun, organisasi *The Call of Islam* yang di dirikan Imam Haron tidak bertahan lama, sang Imam akhirnya terbunuh pada tahun 1969, setelah enam bulan dipenjara di Caledon Square, pusat kosa Cape Town (Saryono, 2006: 42).

Hal ini bermula ketika Imam Haron telah melakukan pertemuan rahasia dengan Imam Anglikan Canon John Collins dari Katerdal St. Paul di London, sang Imam dijemput dan akhirnya ditahan oleh polisi apartheid. Imam Haron diduga disiksa selama dipenjara dan akhirnya meninggal. Hasil otopsi menunjukkan dua tulang rusuk yang patah dan 27 luka memar di sekujur tubuh. Selepas kematiannya, lebih dari 40.000 orang berbaris di sepanjang peti matinya sejauh 6 mil sampai dimakamkan di pemakaman Muslim Moybray (Huda, 2019).

### c) **Fatima Meer Aktivis Perempuan**

Selain tokoh aktivis laki-laki, ada salah satu aktivis anti-apartheid dari kalangan perempuan Muslim, ia bernama Fatima Meer (1928-2010). Meer dikenal sebagai pemimpin wanita pada kampanye *Defiance* (1952), yaitu sebuah aksi protes pembangkangan sipil terhadap undang-undang apartheid, Meer menjadi perempuan pertama di Afrika Selatan yang terlarang bagi pemerintah apartheid, menerima hukuman yang membatasi gerakannya di Durban serta melarang kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan publik dan penerbitan bukunya selama tiga tahun. Selain Aktivis, ia juga dikenal sebagai penulis dan telah menerbitkan 40 buku, salah satunya adalah *Higer Than Hope* (Allen, 2022).

Untuk perannya sebagai organisatoris dan orator perempuan, Meer adalah salah satu anggota pendiri FEDSAW (*Federation of South African Women*) atau Federasi Wanita Afrika Selatan yang didirikan tahun 1954. Selama masa *Treason Trial* yaitu sebuah Pengadilan Penghianatan dari para pimpinan Aliansi Kongres, koalisi kelompok yang dipimpin ANC. Meer mengorganisir upaya untuk membantu para aktivis-aktivis anti-apartheid yang di penjara, termasuk suaminya bernama Ismail Meer seorang aktivis dan pengacara (Saho, 2022).

Meer juga mengikuti aksi di Sharpeville, aksi ini dikenal dengan Pembantaian Sharpeville yang terjadi tahun 1960, yaitu kejadian dimana polisi apartheid menembaki

demonstrasi orang-orang kulit hitam di kota Sharpeville, sebagai reaksi terhadap aturan *Pass Laws* (1952) atau sebuah aturan tanda pengenal bagi kulit hitam. Peristiwa ini adalah salah satu demonstrasi pertama dan paling menyedihkan selama menentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Sekitar 69 orang kulit hitam terbunuh dan 180 dari luka-luka. Sekitar tahun 1975, Meer mendirikan Federasi Kuli Hitam, sebuah kelompok organisasi perempuan. Pada tahun 1976, setelah pemberontakan mahasiswa Soweto, Meer ditahan tanpa pengadilan selama enam bulan karena mencoba mengorganisir masa (Britannica, 2022).

#### **d) Kolaborasi Organisasi-organisasi Muslim Bangkit Melawan**

Kilas balik pada 1952, tahun disahkannya undang-undang wilayah kelompok (*Group Areas Act*). Akibatnya umat Muslim berwarna juga terkena dampak pengusuran dan pemindahan wilayah. Umat Islam terpisahkan dari masjid sebagai pusat perkumpulan kelompok mereka. Sehingga penindasan aturan yang telah dibuat rezim lengkap sudah dialami seluruh elemen, terkecuali kulit putih. Hal ini melahirkan ketidakpuasan bagi kelompok-kelompok Muslim dan menimbulkan berbagai perlawanan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya berakibat pada pembentukan organisasi CMYM (*Cape Muslim Youth Movement/ Gerakan Pemuda Muslim Cape*) berdiri 1957, kemudian dari kalangan pemuda dibentuk CMYA (*Claremont Muslim Youth Association/ Asosiasi Pemuda Muslim Claremont*) pada tahun 1958 (Esack, 2000: 57).

Gerakan-gerakan Islam mulai tumbuh dan terlihat bangkit dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi baru dikalangan Muslim. Pasca terjadinya tragedi Sharpeville (1960), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada periode ini menjadi tahun-tahun penindasan dan penyiksaan paling tidak manusiawi. Ribuan aktivis ditangkap, dan mengalami luka-luka serta 69 meninggal (Esack, 2000: 58). Hal ini menjadi cambuk dan memukul umat Muslim. Terlebih dengan kematian sang Imam Haron, umat Muslim mengalami kepincangan dan kehilangan progresifitas dalam melawan rezim apartheid.

Hal ini memunculkan kekecewaan yang mendalam dikalangan pemuda Muslim, yang disebabkan oleh kebungkaman para ulama mengenai kematian sang Imam, kebungkaman tersebut berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun setelah wafatnya sang Imam (1969-1976). Namun, pada 16 Juni 1976 umat Muslim kembali bangkit pada pemberontakan Soweto, banyak dari masa kulit hitam yang tertangkap seperti Meer. Sehingga memaksa umat Muslim untuk kembali mendefinisikan Islam sebagai basis perjuangan dalam melawan rezim apartheid (Saryono, 2006: 42-43).

Dengan demikian, pada periode 1970-an dapat dikatakan sebagai proses atau fase penggiringan dihapuskannya politik apartheid. Lahirnya generasi baru dan aktivis yang semangat dalam menentang rezim. Di samping faktor internal, dengan terjadinya insiden internasional, Islam muncul sebagai kekuatan politik. Hal ini muncul dengan adanya peristiwa mencolok, yaitu revolusi Iran (1970-an). Pada tahun-tahun tersebut

muncul karya-karya tokoh intelektual seperti Ali Syariati yang banyak dikunyah dan didiskusikan di kalangan pelajar Muslim Afrika Selatan. Di pertemuan-pertemuan diskusi tersebutlah umat Muslim memandang Islam sebagai ideologi pembebasan, dari rasialisme dan ketertindasan bagi masa depan Afrika Selatan (Saryono, 2006: 43).

Seketsa pasang dan surutnya kebangkitan gerakan Muslim di Afrika Selatan yang telah digambarkan, ini disebabkan oleh faktor yang bersifat fundamentalis. Kedua organisasi MYM, dan MSA memperlihatkan diri sebagai oposisi yang tangguh. Dengan adanya media majalah *Muslim News*, turut andil dalam memainkan peran penting. Juga gencar memperkenalkan gerakan BC (*Black Consciousness/ Kesadaran Kulit Hitam*) yang menolak peran orang kulit putih dalam perjuangan pembebasan. BC berangsur-angsur mengisi kekosongan akibat pelarangan ANC dan PAC pada tahun 1962 (Esack, 2000: 60-61).

Dengan demikian, gerakan organisasi-organisasi Muslim memunculkan lahirnya al-Qibla, yang didirikan 1981 melengkapi kebangkitan umat Muslim sebagai formasi gerakan Islam. Semangat tersebut, menjadi benih lahirnya *The Call of Islam* (selanjutnya *Call*) tahun 1984 yang dideklarasikan oleh Farid Esack dan dua temannya, Maulana Ibrahim Musa dan Imam Hassan Solomon. Kesamaan nama *The Call of Islam* yang didirikan Farid Esack tidak ada keterikatan sama sekali dengan Imam Haron. Besarnya skala *Call* dalam retorika militansinya juga menyertai keterlibatan al-Qibla membuat organisasi ini pada 1980-an mengalami kesamaan dengan oposisi umat Muslim dalam melawan rezim apartheid (Saryono, 2006: 41-42)

Perjuangan dan agenda penolakan apartheid dari al-Qibla bisa dibilang menggunakan metode yang sama dengan Imam Haron, hal ini secara berangsur mewarisi al-Qibla dalam militansi, dan revolusioner. Masjid Jami di Cape Town digunakan sebagai basis utama dalam meneriakkan penolakan dan menentang terhadap praktik-praktik diskriminasi dan kapitalisme politik apartheid. Dalam perjuangan tersebut, pada periode ini sejumlah front agama atau juga disebut gerakan lintas agama yang berdampak pada perjuangan pembebasan juga berkembang. Dengan munculnya kepermukaan para petinggi agama, seperti Pendeta Allan Boesak, Pendeta Frank Chikane, Imam Hassan Salomon dan Farid Esack (pendiri *The Call of Islam*), Manibhen Sita dan terbentuknya front politik UDF (*United Democratic Front/ Front Demokrasi Bersatu*) pada tahun 1983 (Esack, 2000: 64).

*The Call of Islam* yang dibentuk Farid Esack menjadi gerakan kelompok Muslim yang paling keras dalam menentang apartheid. Kontribusi dan agenda *Call* dicirikan melalui gerakan-gerakan pertemuan publik, khutbah Jum'at, melakukan kampanye ke pintu-pintu, boikot dan pemberontakan di jalan serta menyebarkan pamflet-pamflet politis-keagamaan. Pemberlakuan trikameralisme (1984) nampaknya menjadi isyarat bagi umat Muslim untuk melepas dukungannya pada apartheid dan menyatu bersama gerakan UDF. UDF menjadi gerakan politik antar lintas agama, komunitas yang menolak

segala bentuk penindasan. Pada periode ini, kampanye-kampanye *Call* bersamaan dengan MJC (*Muslim Judicial Council*/ Dewan Peradilan Muslim) pada akhirnya mengafiliasikan dirinya dan bergabung dengan UDF.

MJC merupakan sebuah badan atau payung nirbala ulama Islam Sunni di Afrika Selatan yang berpusat di Cape Town. Didirikan pada 1945 oleh masyarakat Progresif Muslim, Yusuf Karaan yang menjabat sebagai Kepala Mufti MJC, turut andil dalam menyetujui gerakan antar iman (UDF) lantaran di kalangan Muslim penentangan tersebut dipimpin oleh para pemuda yang terlibat dalam uaya pencarian ekspresi Islam yang baru dan kontekstual (Esack, 2000: 71-72).

UDF memiliki tujuan membangun Afrika Selatan yang bersatu tanpa ada apartheid, segregasi dihapuskan dan masyarakat dibebaskan dari ketertindasan institusional yang sistematis. Tujuan bersama tersebut memungkinkan berbagai macam organisasi untuk bekerjasama tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama diterima selama mereka mempromosikan pengakhiran apartheid. Terbukti pada tahun 1986, ada 700 organisasi berbeda yang bergabung bersama dalam gerakan UDF.

Dengan dibentuknya UDF dan partisipasi kelompok-kelompok Muslim, seperti *Call of Islam* yang makin nyata dengan front lintas agama dalam melawan rezim apartheid, nampaknya memicu perdebatan dan pertentangan bagi kalangan Islam konservatif. Tidak menjadi heran, melihat keterlibatan Farid Esack dengan sejumlah tokoh Muslim lain yang melibatkan pemeluk agama lain untuk berjuang bersama, dianggap sesuatu yang tercela. Sehingga kelompok Islam Konservatif mempertanyakan mengenai isu-isu teologis mendasar, soal iman dan makna *ukhuwah*. Bahkan tidak jarang kecaman melalui majalah memperlihatkan kebencian yang nyata, ironisnya kelompok Islam konservatif menstigma kafir bagi orang yang bekerjasama dengan Kristen dan Yahudi meskipun untuk tujuan yang mulia (Esack, 2000: 67-69).

Bagi Farid Esack, dengan adanya pertentangan umat Muslim terhadap gerakan antar iman akan menggeser pada isu pokok, yaitu menentang rezim apartheid dan segala bentuk ketidakadilan. Hal ini terlihat pada bulan Agustus 1984, ketika sembilan belas pemimpin dari kelompok agama yang berbeda ditahan karena melanggar aturan memasuki kota kulit hitam Gugulethu.

Kita saling bertemu: berbeda dalam agama namun bersejawat dalam perjuangan. Sembilan belas orang kecil menanti dalam penjara yang dingin... Disini kita mengalami dialog antar agama pada tataran tertinggi. Hanya dalam delapan jam, kecurigaan dan ketakpercayaan bertahun-tahun pun luluh (Esack, 2000: 66).

Dalam komunitas Muslim tersebut, penahanan itu rupanya menjadikan debat soal pembenaran terhadap aksi bersama penganut antar agama yang menentang apartheid. Serangkaian aksi dan perlawanan serta kecaman yang datang dari Islam konservatif menjadikan terbentuknya WCRP (*World Conference Religion and Peace*/ Agama dan Perdamaian Konferensi Dunia) yang dicetuskan oleh Uskup Desmond Tutu

pada 1983. Inisiatif ini memperdalam solidaritas antar iman dalam menggalang keberagaman. *Call of Islam* bersamaan WCRP menjadi simbol nyata pada keterlibatannya pada UDF dalam berjuang menggulingkan rezim apartheid (Saryono, 2006: 46).

“UDF mengajari kita bahwa dibutuhkan banyak organisasi akar rumput untuk membentuk kondisi yang memungkinkan kaum Muslim memosisikan diri secara tepat di dalam perjuangan (Esack, 2000: 64).”

Kaitannya UDF, secara resmi tidak pernah bergabung dengan ANC (organisasi yang dilarang rezim setelah pimpinan-pimpinannya dipenjara). Namun sepanjang keberadaannya, pada tahun 1985, UDF menuntut kepada rezim untuk membebaskan para pimpinan-pimpinan ANC yang dipenjara seperti Nelson Mandela yang saat itu sebagai ketua ANC. Secara resmi UDF dibubarkan tahun 1991 setelah apartheid dihapuskan dan organisasi ANC dicabut larangannya pada 1990.

## **PENUTUP**

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan pada pembahasan di atas, maka simpulan penelitian ini adalah:

1. Politik apartheid dirancang sebagai sistem hukum yang kejam di Afrika Selatan telah berlangsung selama kurang lebih 42 tahun (1948-1990). Apartheid sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan strategi-strategi rasialisme yang dibuat guna menindas hak-hak masyarakat kulit hitam dari segala aspek kehidupan, dengan alasan mengawal ekonomi dan sosial sebagai stabilitas negara. Sehingga dapat ditarik benang merahnya bahwa munculnya politik apartheid di Afrika Selatan adalah pembentukan kebijakan yang digunakan kelompok kulit putih untuk menjaga dan menjamin supermasi atau kedudukannya, bahwa orang yang berkulit hitam dianggap rendah. Sehingga aturan-aturan diskriminasi tersebut diterapkan dalam kebijakan negara.
2. Islam sebagai agama yang membawa visi perdamaian tentu membuat sekelompok Muslim minoritas menentang praktik kekejaman apartheid. Kelompok-kelompok Muslim tersebut yang memiliki ciri berbeda dalam hal keyakinan mampu bertahan dan dengan solidaritas yang kuat antar sesama. Maka terwujudlah suatu minoritas Muslim yang baru di Afrika Selatan. Dengan hal ini, Islam mampu membentuk pengaruh dalam pola hubungan yang kuat di dalam masyarakat. Muslim minoritas mampu melakukan tindakan-tindakan sosial dalam memunculkan perlawanan terhadap rezim apartheid. Perlawanan tersebut dibuktikan dengan dibentuknya organisasi-organisasi yang dimotori oleh tokoh Muslim Afrika Selatan, seperti Imam Haron dengan *The Call of Islam* yang serupa dengan nama organisasi yang dibentuk Farid Esack setelah meninggalnya Imam Haroon. Melihat jumlah umat Muslim yang minoritas, maka banyak para pemimpin Islam melakukan gerakan yang tergabung dengan gerakan ANC dan UDF yang dibentuk pada detik-detik dihapuskannya politik apartheid, sebuah wadah gerakan lintas iman yang gigih menentang pemerintahan.

Kontribusi gerakan-gerakan tersebut membuahkan hasil ketika Botha menyerahkan jabatannya kepada Frederik Willem de Klerk tahun 1989. Dengan banyaknya konsolidasi dan negosiasi, sekaligus Frederik adalah presiden yang sangat terbuka dan pro-penghapusan apartheid, pada 1990 ia menyatakan penghapusan undang-undang yang rasis tersebut dan bergerak ke arah kebebasan dan kesetaraan. Pada 1994 menjadi bukti nyata manakala pemilu yang dilaksanakan pada 27 April 1994 dilaksanakan dengan demokratis, dan menjamin kesetaraan semua hak kewarganegaraan tanpa memandang ras, agama dan warna kulit di Afrika Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AM, Sadirman dan Amurwani Dwi Lestariningsih. 2014. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Abdurrahman, Dudung. 2019. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Dipuyodo, Kirdi. 1983. *Afrika Selatan dalam Pergolakan 2*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.
- Esack, Farid. 2000. *Membebaskan yang Tertindas; Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Kettani, Ali M. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Maryam, Siti dkk. 2002. *Sejarah Peradaban Islam: dari Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Pram, Tofik. 2014. *Jejak Perlawanan Mandela di Antara Suramnya Kolonialisme dan Politik Apartheid*. Bandung: Edelweiss.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeratman, Darsiti. 2012. *Sejarah Afrika*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Basri. "Tauhid dalam Prespektif Farid Esack" dalam *Jurnal Kajian al-Qur'an & Tafsir* Volume 5, No. 1, 2020.
- Budiman, Agus. "Politik Apartheid di Afrika Selatan" dalam *Jurnal Artefak* Vol. 1 No. 1 Januari 2013.
- Iswahyudi. "Hermeneutika Praksis Liberatif Farid Esack" dalam *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* Volume 2, Nomor 2, September 2012.
- Kustiwa, Iwa dan Supriyadi A. Arief. "Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia dan Afrika Selatan (Prespektif Lembaga Pelaksana dan Upaya Kedepan)" dalam *de Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021.

- Marzuenda. "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (Islam di Afrika Utara dan Afrika Selatan)" dalam *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* ISSN 2460-9870. Online 2807-1883 Volume 10 Nomor 1. Maret 2021-Agustus 2021.
- Ms, Trubus. "Penyelesaian Konflik Sosial: Belajar dari Pengalaman Afrika Selatan" *Jurnal Pusat Pemberdayaan Rekonsiliasi dan Perdamaian UKRIDA* dalam <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/2.3.2-Trubus.pdf> diakses pada 15 September 2022.
- Mustaghfirin, Ahmad. "Islamisasi di Afrika Sub-Sahara" dalam *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol 14, No. 02, 2019.
- Nabilah, An Nisa, dkk. 2016. "Islamisasi di Afrika Timur, Selatan dan Utara" dalam jurnal <https://id.scribd.com/document/332540330/Islamisasi-Di-Afrika-Timur-Selatan-Dan-Utara> diakses pada 25 September 2022.
- Prahesti, Vivin Devi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD" dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 (November-November 2021).
- Ridwan. "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Prespektif Pemikiran Hasan Al-Banna" dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 2, November-November 2017.
- Sudarman. "Pemikiran Farid Esack Tentang Hermeneutika Pembebasan Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Adyan/Vol.X, No. 1/Januari-Juni/2015*.
- Wahid, M. Abduh. "Tafsir Liberatif Farid Esack" dalam *E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar*. Tafsere Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016.
- Wicaksono, Herman. "Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika" dalam *Jurnal Rihlah* Vol. 8 No. 1/2020.
- Elvira Haba, Odilia. 2007. "Politik Apartheid di Afrika Selatan Tahun 1948-1990" dalam *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hidayat, Slamet. 2021. "Implementasi Solidaritas Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Eksistensi Ekonomi Pedagang (Studi Kasus PKL Jln. Kampus Grendeng Purwoketo Utara)" dalam *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Kusumaningrum, Ika Fitriyana. 2013. "Xenophobia di Afrika Selatan Sebagai Warisan Politik Apartheid" dalam *Skripsi*. Jatinagor: Universitas Padjajaran.
- Saryono. 2006. "Teologi Pembebasan Islam (Studi atas Pemikiran Farid Esack)" dalam *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Susanti, Eka. 2011. "Perjuangan Nelson Mandela dalam Menentang Politik Apartheid di Afrika Selatan" dalam *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Aswar, Muhammad. 2020. "Kota Islam yang Terlupakan (4): Cape Town Afrika Selatan, Kisah para Ulama Pejuang yang Dibuang" dalam <https://alif.id/read/muhammad-aswar/kota-islam-yang-terlupakan-4-cape-town-afrika-selatan-kisah-dari-sebrang-b228315> diakses pada 22 September 2022.

- Allen, Judith Imel Van. "Fatimah Meer" Encylopedia Bitannica, 8 Agustus 2022, dalam <https://www.bitannica.com/biography/Fatima-Meer>. Diakses pada 15 September 2022.
- Britaannica, Editor Ensiklopedia. "Pembantaian Sharpeville" Encylopedia Bitannica, 14 maret 2022, dalam <https://www.britannica.com/event/Sharpeville-massacre> diakses pada 15 September 2022.
- Fakhriansyah, Muhammad. "Mandela dan Pemilu yang Meruntuhkan Apartheid di Afrika Selatan" dalam tirto.Id <https://tirto.id/gdPK> diakses pada 09 Februari 2022.
- Huda, Nurul. "Abdullah Haron, Ikon Perjuangan Muslim Melawan Apartheid" Kisah: Tokoh Islami.co dalam <https://islami.co/abdullah-haroon-ikon-perjuangan-muslim-melawan-apartheid/> diakses pada 14 September 2022.
- Muhtadi, Burhanudin. "Farid Esack" dalam Makalah IslamLib <https://islamlib.com/> diakses pada 09 Februari 2022.
- Prasodjo, Haryo. "Xenophobia dalam Kasus Apartheid di Afrika Selatan" dalam Ilmu Hubungan Internasional <https://haryo-prasodjo.blogspot.com/2013/04/xenophobia-dalam-kasus-apartheid-id.html> diakses pada 9 Oktober 2022.
- Tsaqif Wardhana, Adien. "Kelompok Muslim yang Ikut Menentang Politik Perbedaan Warna Kulit di Afrika Selatan" dalam kolom sejarah <https://islami.co> diakses pada 09 Februari 2022.
- KBBI Daring dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patriarki> diakses pada 15 September 2022.
- HuffPost, Staff Reporter. "Ahmed Kathrada's Most Notable Moments" dalam Berita HuffPost [http://www.huffingtonpost.co.za/2017/03/28/in-date-succession-the-life-and-death-of-ahmed-kathrada\\_a\\_22014662/](http://www.huffingtonpost.co.za/2017/03/28/in-date-succession-the-life-and-death-of-ahmed-kathrada_a_22014662/) diakses pada 15 September 2022.
- Saho. Editor Ensiklopedia. "Professor Fatima Meer". South African History Online, 19 Agustus 2022 dalam <https://www.sahistory.org.za/people/professor-fatima-meer> diakses pada 15 September 2022.
- Wulandari, Retno. "Mozaik: Sejarah Panjang Muslim di Afrika Selatan." Khasanah Koran Republika, 7 Maret 2016, dalam <https://www.republika.co.id/berita/03nyga21/mozaik-sejarah-panjang-muslim-di-afrika-selatan> diakses pada 14 September 2022.

